

EVALUASI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GURU: LITERATUR REVIEW

Mulyadi¹, Weli Agustin², Dilla Nurhalimah³, Nevi Latina⁴, Shafiqah Ali Azizah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Email: mulyadiahmad@unja.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1333>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 October 2025

Final Revised: 25 November 2025

Accepted: 28 November 2025

Published: 21 December 2025

Keywords:

Effectiveness

Teacher

Policy

Curriculum

Education



ABSTRAK

The quality of education is a primary factor in creating a nation's competitiveness, with teachers playing a vital role in the learning process. However, efforts to improve teacher quality in Indonesia face complex challenges, including issues of welfare, pedagogical competence, and suboptimal systemic support. This study aims to evaluate the effectiveness of implemented educational policies in improving teacher quality based on a literature review. The method used is library research with a qualitative approach through thematic analysis of various relevant literature studies. The results indicate that policies such as teacher certification and continuous training have a positive impact on teachers' economic welfare but are not always followed by a significant improvement in pedagogical performance. Furthermore, the Merdeka Curriculum policy provides flexibility in teaching but faces implementation challenges, especially related to teacher readiness and inadequate supporting infrastructure. The conclusion of this study is that although educational policies have the potential to improve teacher quality, their effectiveness depends on comprehensive implementation and continuous support, as well as the need for further research to explore factors influencing the success of these policies.

ABSTRAK

Kualitas pendidikan merupakan faktor utama dalam menciptakan daya saing bangsa, di mana guru memainkan peran vital dalam proses pembelajaran. Namun, peningkatan kualitas guru di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk masalah kesejahteraan, kompetensi pedagogik, dan dukungan sistemik yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam meningkatkan kualitas guru berdasarkan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui analisis tematik terhadap berbagai studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti sertifikasi guru dan pelatihan berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi guru, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kinerja pedagogis. Selain itu, kebijakan kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pengajaran, namun menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kesiapan guru dan infrastruktur yang kurang mendukung. Simpulan dari penelitian ini adalah meskipun kebijakan pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas guru, efektivitasnya tergantung pada implementasi yang menyeluruh dan dukungan berkelanjutan, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas, Guru, Kebijakan, Kurikulum, Pendidikan.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan menjadi fondasi esensial bagi daya saing dan kemajuan suatu bangsa, di mana guru memainkan peran sentral sebagai ujung tombak transformasi ilmu dan nilai dalam proses pembelajaran (Abid dkk., 2023; Fatima, 2023; Savira, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi profesional, dedikasi, dan kinerja guru telah ditetapkan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan pendidikan nasional. Meskipun demikian, berbagai kajian dan laporan empiris mengungkapkan bahwa upaya meningkatkan mutu pendidik tersebut dihadapkan pada tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensi. Tantangan-tantangan itu tidak hanya mencakup aspek kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi pedagogik, tetapi juga meliputi persoalan kesejahteraan, motivasi kerja, serta dukungan sistemik yang belum optimal (Brauer, 2021; Goulart dkk., 2021; Septaria dkk., 2025). Kompleksitas tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan kebijakan yang holistik dan terevaluasi dengan baik untuk menghasilkan perubahan yang bermakna dan berkelanjutan.

Merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah meluncurkan dan mengimplementasikan serangkaian kebijakan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk mendongkrak mutu para pendidik (Pratikno dkk., 2022; Xue dkk., 2021). Inisiatif kebijakan tersebut memiliki cakupan yang luas dan multiaspek, meliputi program sertifikasi profesi untuk menjamin standar kompetensi minimum, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*), penerapan sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG), serta pemberian berbagai bentuk insentif, baik finansial maupun non-finansial (Anggraheni dkk., 2024; Muid dkk., 2025). Namun, implementasi beragam instrumen kebijakan tersebut justru memunculkan pertanyaan kritis dan mendasar di tingkat praktis, terutama mengenai sejauh mana efektivitasnya mampu menciptakan transformasi yang substansial dan berkelanjutan dalam kapasitas profesional serta praktik instruksional guru di ruang kelas yang sesungguhnya.

Banyak kajian terdahulu telah berusaha mengevaluasi dampak kebijakan-kebijakan tersebut, dan hasil yang ditemukan bersifat variatif serta tidak selalu konklusif. Di satu sisi, terdapat penelitian Amelia & Rozak, (2025) mengonfirmasi bahwa kebijakan seperti sertifikasi guru telah memberikan dampak positif terhadap aspek kesejahteraan ekonomi dan peningkatan status sosial profesi guru. Hal lainnya, penelitian Purwanti dkk., (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang tercapai seringkali tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan dan linier dalam kinerja pedagogis guru di kelas ataupun peningkatan hasil belajar peserta didik. Kontradiksi dalam temuan empiris ini secara jelas mengisyaratkan adanya kesenjangan yang lebar antara tujuan normatif kebijakan yang dirumuskan secara ideal di tingkat makro dengan realitas implementasi serta capaian hasil (*outcome*) yang terukur di tingkat sekolah, sehingga mempertanyakan efektivitas kebijakan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap program pelatihan guru sering kali menyoroti masalah keberlanjutan dan relevansi. Kajian (Jaja & Ofubaraibim, 2025) menemukan bahwa model pelatihan yang bersifat *top-down* dan sekali waktu (*one-off training*) memiliki dampak yang terbatas dalam mengubah praktik pedagogis guru secara mendalam. Guru sering kali kembali kepada metode konvensional setelah pelatihan usai, karena kurangnya pendampingan lanjutan, komunitas belajar, atau dukungan dari lingkungan sekolah. Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada desain program, tetapi juga pada faktor pendukung ekosistem pendidikan di tingkat mikro.

Di sisi lain, kebijakan penilaian kinerja guru (PKG) yang dimaksudkan sebagai alat pengembangan profesional juga menghadapi kendala dalam implementasinya (Hasanah,

2021; Ningsih & Suryaman, 2025; Silfiana dkk., 2025). (Surbakti, 2024) mengkritik bahwa proses PKG sering terjebak pada aspek administratif dan formalitas, alih-alih menjadi refleksi dialogis yang konstruktif untuk perbaikan praktik mengajar. Akibatnya, potensi kebijakan ini sebagai instrumen formatif untuk identifikasi kebutuhan dan peningkatan kompetensi guru secara spesifik belum sepenuhnya tergali optimal. Dari panorama penelitian di atas, terlihat bahwa meskipun banyak kajian telah membahas dampak masing-masing kebijakan secara parsial, sintesis yang komprehensif dan integratif masih terbatas. Literatur yang ada cenderung terfragmentasi menurut jenis kebijakan tertentu tanpa banyak melakukan analisis komparatif atau mencari benang merah dari faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan yang bersifat lintas kebijakan. Kesenjangan ini menyebabkan kurangnya pandangan holistik untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang sinergis dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana efektivitas berbagai kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru berdasarkan tinjauan terhadap literatur ilmiah terkait?” Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan literature review yang kritis dan sistematis guna mengevaluasi temuan-temuan empiris mengenai efektivitas kebijakan peningkatan kualitas guru, menganalisis faktor pendukung dan penghambat, serta mengidentifikasi celah pengetahuan (research gap) untuk studi mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis berupa peta pengetahuan yang terintegrasi bagi peneliti, dan manfaat praktis berupa bahan pertimbangan bagi para perumus kebijakan dalam mendesain intervensi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan terukur dampaknya terhadap peningkatan profesionalisme guru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan telaah mendalam dan sistematis terhadap literatur ilmiah (Connaway & Radford, 2021). Penelitian kepustakaan dilaksanakan selama periode empat bulan, dari September hingga Desember 2025, dengan fokus kajian pada sumber-sumber tertulis yang dapat diakses secara daring (online) maupun luring (offline). Ruang lingkup penelitian tidak terbatas secara geografis, mencakup studi-studi yang diterbitkan dalam konteks Indonesia untuk mendapatkan relevansi kontekstual, serta studi internasional untuk memperkaya perspektif komparatif.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan desain literature review yang bersifat naratif. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai kajian terdahulu secara komprehensif. Subjek penelitian atau unit analisis dalam studi ini adalah dokumen-dokumen ilmiah yang menjadi sumber data primer, yang meliputi artikel penelitian empiris (kuantitatif, kualitatif, dan campuran) yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi, laporan penelitian dari lembaga resmi (seperti Kemdikbudristek, BPS, atau World Bank), tesis dan disertasi, serta buku-buku referensi yang membahas secara spesifik evaluasi kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas guru.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah yang mengikuti model analisis tematik (Yanti, 2022). Data dari berbagai sumber dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan jenis kebijakan yang dievaluasi. Selanjutnya, dilakukan proses kodifikasi, kategorisasi, dan interpretasi untuk mengidentifikasi pola-pola temuan, persamaan, perbedaan, serta kontradiksi antar-studi. Dari sini, ditarik tema-tema analitis yang menjawab rumusan masalah, seperti tema

mengenai kesenjangan antara tujuan dan implementasi, faktor keberhasilan, dan tantangan sistematis. Proses sintesis dilakukan untuk menyusun argumen yang koheren mengenai tingkat efektivitas berbagai kebijakan dan memberikan rekomendasi berdasarkan celah pengetahuan (research gap) yang teridentifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai literatur untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk sintesis tematik untuk mengorganisir dan menganalisis temuan-temuan dari berbagai kajian empiris dan telaah kebijakan terdahulu yang relevan. Berdasarkan tinjauan literatur terhadap 14 publikasi kunci, efektivitas berbagai kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru dapat dipetakan dan dikelompokkan berdasarkan fokus intervensinya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum, kesenjangan, dan faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan dari setiap jenis kebijakan. Tabel berikut menyajikan rangkuman sistematis atas hasil review tersebut, yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk pembahasan mendalam mengenai dinamika dan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan.

Tabel 1. Sintesis Hasil Review Literatur tentang Efektivitas Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru

No.	Kebijakan / Program / Fokus Penelitian	Metode / Pendekatan	Temuan / Efektivitas terhadap Kualitas Guru / Pendidikan	Catatan / Hambatan / Keterbatasan
1	Program Pengembangan Kompetensi Guru (in-service PD)	Studi pustaka / literatur review	Meningkatkan kinerja guru-guru menjadi lebih profesional.	Jika PD tidak berkelanjutan, hasil jangka panjang bisa kurang stabil.
2	Pelatihan Guru untuk Pendidikan Inklusif (PAUD)	Studi literatur (analisis isi jurnal)	Meningkatkan kompetensi pedagogis, kesiapan guru menangani keberagaman siswa & inklusi	Pelatihan harus sistematis dan kontekstual agar efektif.
3	Pelatihan dan Pendidikan Guru (khusus Fisika)	Studi empiris (program diklat)	Membantu peningkatan kualitas pengajaran fisika menunjukkan bahwa diklat berdampak positif.	Belum tentu diikuti oleh semua guru; bergantung pada pelaksanaan diklat.
4	Pengelolaan Profesionalitas & Pengembangan Guru (Kabupaten Bogor)	Studi kasus: wawancara, dokumentasi	Menampilkan pentingnya perencanaan & evaluasi dalam program pengembangan guru; potensi perbaikan profesionalitas.	Banyak hambatan analisis kebutuhan kurang detail, evaluasi aspek non-teknis sering terabaikan
5	Kebijakan Sertifikasi Guru (<i>Teacher Certification Policy</i>)	Studi kualitatif, wawancara & analisis kebijakan.	Sertifikasi memberikan pengakuan profesional, potensi peningkatan pedagogis.	Implementasi sering terhambat oleh dukungan operasional, distribusi

				guru timpang, anggaran; efektivitas tidak merata.
6	Kebijakan Kurikulum Merdeka / Merdeka Belajar	Studi lapangan & dokumentasi (wawancara, observasi) di sekolah	Memberi keleluasaan bagi guru & sekolah dalam merancang pembelajaran; potensi peningkatan kualitas pembelajaran.	Banyak guru merasa kesulitan adaptasi; kurang pelatihan & dukungan praktik; infrastruktur dan kesiapan guru menjadi kendala.
7	Evaluasi & Supervisi Akademik (Monitoring mutu pembelajaran)	Kajian kebijakan/ evaluasi program	Supervisi akademik membantu meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberi bimbingan & refleksi profesional.	Jika supervisi dilakukan hanya sebagai formalitas, dampaknya terbatas.
8	Program Komprehensif kebijakan melalui kebijakan pemerintah daerah (manajemen guru & kualitas)	Studi literatur / analisa kebijakan.	Pemerintah & institusi pendidikan bersama-sama dapat merancang strategi untuk meningkatkan kualitas guru & mutu pendidikan.	Butuh koordinasi lintas pemangku kepentingan; kebijakan tidak cukup jika tidak ada implementasi konkret.
9	Upaya Menurunkan Absen & Meningkatkan Kualitas Guru melalui Kebijakan & Insentif	Evaluasi kebijakan	Mengurangi absenteeism guru; potensi peningkatan kualitas pengajaran secara keseluruhan.	Hasil jangka panjang tergantung pada konsistensi implementasi dan monitoring.
10	Kebijakan pendidikan & reformasi kurikulum sebagai bagian dari kebijakan sistemik nasional	Analisa kebijakan & dokumen sistem (studi literatur)	Menekankan peran sistem pendidikan nasional dalam membentuk SDM melalui kebijakan yang mendukung kualitas guru.	Tantangan besar: pemerataan akses, relevansi kurikulum, kualitas guru, dukungan infrastruktur.
11	Reformasi & kebijakan berbasis praktik & relevansi (misalnya pengembangan kurikulum & pembelajaran kontekstual)	Studi literatur & analisa kebijakan.	Dapat meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan zaman, mendukung kompetensi abad 21.	Butuh kesiapan guru & sekolah, serta pelatihan dan dukungan sistemik untuk implementasi optimal.
12	Kebijakan insentif dan pengakuan profesi guru (termasuk aspek kesejahteraan)	Studi kebijakan & wawancara (termasuk dalam studi sertifikasi)	Meningkatkan rasa profesionalitas dan motivasi guru melalui pengakuan & insentif finansial.	Jika tidak diimbangi dengan pelatihan & dukungan praksis, motivasi saja tidak cukup.
13	Program pengembangan guru berkelanjutan (continuous professional	Studi literatur / program evaluasi kebijakan.	Menyediakan jalur peningkatan profesional guru secara berkelanjutan, mendukung kualitas	Jika tidak ada evaluasi kebutuhan, program bisa kurang tepat sasaran.

	development)			jangka panjang.	
14	Kebijakan yang menggabungkan kurikulum fleksibel + pengembangan guru + supervisi	Analisa kebijakan & implementasi (beragam sumber)		Potensi terbesar: sinergi antara kebijakan, pelatihan, supervisi → peningkatan kualitas guru & pembelajaran.	Memerlukan koordinasi, konsistensi, dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pendidikan yang tercantum dalam tabel, dapat dilihat bahwa berbagai kebijakan dan program yang diterapkan di Indonesia memiliki dampak yang berbeda terhadap kualitas guru dan pendidikan. Salah satu kebijakan yang paling banyak dibahas adalah sertifikasi guru. Studi oleh Ijsoc (2023) menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan pengakuan profesional yang penting, namun dampaknya terhadap peningkatan kinerja pedagogis di kelas sering kali tidak linier, dengan beberapa penelitian menemukan bahwa meskipun guru menerima insentif finansial, hal tersebut tidak selalu disertai dengan perubahan signifikan dalam metode pengajaran atau hasil belajar siswa (Ijsoc, 2023). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang bersifat ideal dengan implementasinya di lapangan.

Selain itu, kebijakan pelatihan guru berkelanjutan yang dilakukan oleh Firmsari (2025) menunjukkan bahwa meskipun pelatihan dapat meningkatkan kompetensi pedagogis, dampaknya sering terbatas karena program pelatihan tersebut sering kali bersifat top-down dan hanya dilakukan sekali. Guru kembali ke metode pengajaran lama setelah pelatihan berakhir karena kurangnya pendampingan dan dukungan dalam jangka panjang (Firmsari, 2025). Ini menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam program pengembangan profesional untuk memastikan perubahan yang signifikan dan jangka panjang. Supervisi akademik yang dijelaskan oleh Fauzan dkk., (2025) juga menunjukkan dampak positif dalam peningkatan kualitas pengajaran, terutama dalam memberi bimbingan dan umpan balik yang dapat meningkatkan kinerja guru. Namun, studi tersebut juga mengidentifikasi bahwa apabila supervisi hanya dilakukan sebagai formalitas administratif tanpa ada keterlibatan aktif dalam pengembangan praktis, dampaknya bisa terbatas Fauzan dkk., (2025) Hal ini menunjukkan bahwa kualitas supervisi yang efektif harus melibatkan elemen kolaboratif dan pembelajaran berkelanjutan.

Pada kebijakan kurikulum Merdeka yang diperkenalkan oleh Kemdikbudristek, hasil penelitian oleh Nurhayati dkk., (2025) menunjukkan potensi besar dalam memberikan fleksibilitas bagi guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Meskipun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah kesiapan guru yang bervariasi, infrastruktur yang tidak merata, dan kurangnya pelatihan yang memadai. Guru yang tidak siap atau tidak memiliki dukungan sistemik yang cukup sering kesulitan dalam mengadaptasi kurikulum baru (Nurhayati dkk., 2025). Selain itu, kebijakan insentif yang dirancang untuk meningkatkan motivasi guru juga mendapat perhatian dalam beberapa studi. Sebagai contoh, penelitian oleh Serambi (2023) mengungkapkan bahwa meskipun insentif finansial dan non-finansial dapat meningkatkan motivasi kerja, efektivitasnya akan sangat terbatas jika tidak diimbangi dengan pelatihan yang relevan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Insentif sendiri tidak dapat mengatasi masalah mendasar seperti kurangnya dukungan lingkungan sekolah atau sistem pendidikan yang tidak mendukung (Serambi, 2023).

Evaluasi kebijakan daerah, seperti yang dilakukan oleh Efendi & Sholeh, (2023) menekankan bahwa kebijakan yang sukses dalam meningkatkan kualitas guru harus

melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah, serta sistem evaluasi yang memadai untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh guru di lapangan. Namun, kebijakan ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Efendi & Sholeh, 2023). Dari keseluruhan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan yang ada memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas guru, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang menyeluruh dan sistemik. Kebijakan pendidikan harus tidak hanya memberikan insentif atau pelatihan, tetapi juga perlu memastikan bahwa ada dukungan yang berkelanjutan, pemantauan yang ketat, dan evaluasi yang komprehensif untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa (Amelia & Rozak, 2025).

Pembahasan

Sintesis dari berbagai kajian terdahulu mengungkap tiga poin kunci utama dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan peningkatan kualitas guru. Pertama, teridentifikasi adanya pola disparitas yang konsisten antara capaian tujuan administratif suatu kebijakan dengan dampak riilnya terhadap transformasi praktik pedagogis di kelas. Kedua, faktor penentu keberhasilan kebijakan lebih banyak bertumpu pada aspek implementasi dan dukungan sistemik, bukan semata pada desain kebijakan itu sendiri. Ketiga, muncul bukti kuat mengenai superioritas pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan dibandingkan dengan program yang bersifat parsial dan insidental.

Disparitas antara Output Administratif dan Outcome Pedagogis

Temuan ini sangat jelas terlihat pada evaluasi kebijakan sertifikasi guru dan berbagai program pelatihan (in-service PD). Sejalan dengan penelitian Sutrisno & Riyanto (2018) serta Faisal (2017), review ini mengonfirmasi bahwa sertifikasi berhasil mencapai output administratif berupa peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan standar kualifikasi. Namun, transformasi outcome berupa peningkatan kinerja mengajar dan hasil belajar siswa, sebagaimana diidealkan dalam kebijakan, tidak terjadi secara linear. Fenomena serupa ditemukan pada banyak program pelatihan yang berfokus pada penyelesaian kuota jam pelatihan (sebagai output), namun gagal menyediakan pendampingan pascapelatihan untuk memastikan transfer ilmu ke dalam praktik mengajar (sebagai outcome). Hal ini menguatkan argumen Darling-Hammond (2017) bahwa kebijakan berorientasi akuntabilitas birokratik sering kali berhenti pada logika kepatuhan (compliance) dan mengabaikan logika peningkatan kapasitas (capacity building) yang bersifat substantif.

Faktor Implementasi dan Dukungan Sistemik sebagai Penentu Utama

Pembahasan mengungkap bahwa efektivitas hampir semua kebijakan sangat bergantung pada kualitas implementasi dan dukungan ekosistem pendidikan di tingkat sekolah. Temuan mengenai rendahnya dampak Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan kesulitan implementasi Kurikulum Merdeka memperjelas hal ini. Sebagaimana diidentifikasi Anwar (2016) dan Hidayat & Nurohman (2021), PKG yang seharusnya bersifat formatif dan berkembang, pada praktiknya terdegenerasi menjadi aktivitas administratif karena kurangnya kapasitas supervisor, waktu, dan budaya umpan balik yang konstruktif. Demikian pula, kebijakan kurikulum yang progresif seperti Merdeka Belajar justru menemui hambatan besar akibat kesenjangan kesiapan guru, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pelatihan kontekstual. Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang menekankan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi adalah variabel kritis yang sering terabaikan, sehingga menyebabkan *implementation gap*.

Keunggulan Pendekatan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Kajian ini menemukan bukti yang konsisten bahwa kebijakan yang terfragmentasi cenderung memiliki dampak yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Sebaliknya, program-program yang menunjukkan efektivitas lebih tinggi, seperti pelatihan inklusif yang sistematis dan kontekstual atau model pengembangan guru berbasis *community of practice*, memiliki karakteristik terintegrasi dan berjangka panjang. Temuan ini mendukung teori pengembangan profesional efektif Desimone (2009), yang mensyaratkan durasi yang cukup, fokus konten yang spesifik, serta koherensi dengan tujuan sekolah. Sintesis pada poin 14 dalam Tabel 1 secara eksplisit menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan kurikulum fleksibel, pengembangan guru yang relevan, dan supervisi akademik yang membina berpotensi menghasilkan dampak paling signifikan. Pendekatan ini mengatasi kelemahan utama program parsial, yang menurut Pratiwi & Damayanti (2019), hanya menyentuh satu aspek (misalnya motivasi via insentif) tanpa memperkuat aspek pendukung lainnya (seperti kompetensi dan dukungan praktis).

Temuan-temuan di atas memiliki implikasi mendasar bagi perumusan kebijakan ke depan, yaitu perlunya pergeseran paradigma dari kebijakan yang berorientasi output menuju kebijakan yang berorientasi outcome dan proses. Selain itu, review ini berhasil mengidentifikasi beberapa gap penelitian yang perlu diisi: (1) Ketiadaan Studi Longitudinal yang melacak dampak kebijakan terhadap *trajectory* karier dan praktik guru dalam dekade; (2) Minimnya Studi yang Menyelami Perspektif Guru secara mendalam (*emic perspective*) untuk memahami resistensi, adaptasi, dan makna yang mereka berikan terhadap suatu kebijakan; serta (3) Analisis Efisiensi Biaya-Manfaat yang masih jarang dilakukan untuk membandingkan efektivitas relatif berbagai alternatif kebijakan dengan anggaran yang setara.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan di Indonesia memiliki dampak yang beragam terhadap peningkatan kualitas guru. Meskipun kebijakan seperti sertifikasi guru, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan kurikulum Merdeka menunjukkan potensi dalam memperbaiki kualitas pengajaran, efektivitasnya sering terhambat oleh tantangan implementasi di lapangan, seperti kurangnya dukungan sistemik, ketidakmerataan pelatihan, dan kesiapan guru. Studi juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan dan realitasnya di kelas. Oleh karena itu, untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kualitas pendidikan, kebijakan harus disertai dengan pelatihan yang relevan, dukungan berkelanjutan, serta evaluasi yang komprehensif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pendidikan dan untuk merumuskan rekomendasi yang lebih holistik dan terintegrasi.

REFERENSI

- Abid, M. N., Mubbshar, H. M., & Mushtaq, M. T. (2023). A Study of the Characteristics of Idealist Educators at Secondary Level. *Journal of Educational Research & Social Sciences Review (JERSSR)*, 3(4).
- Amelia, R., & Rozak, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran: Antara Kebutuhan Profesionalisme dan Tuntutan Administratif. *Media Manajemen Pendidikan*, 8(2), 387–399.

- Anggraheni, I., Hadi, S., & Pristiani, R. (2024). Pengembangan profesional guru di sekolah dasar indonesia dalam konteks kebijakan nasional. *PAEDAGOGY: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 4(4), 590–600.
- Brauer, S. (2021). Towards competence-oriented higher education: A systematic literature review of the different perspectives on successful exit profiles. *Education+ Training*, 63(9), 1376–1390.
- Connaway, L. S., & Radford, M. L. (2021). *Research methods in library and information science*. Bloomsbury Publishing USA.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85.
- Fatima, I. (2023). Role of Teachers to impart quality education for equitable learning. *Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal*, 2(3), 462–471.
- Fauzan, R., Harjito, H., Nurkolis, N., & Soedjono, S. (2025). Implementasi Supervisi Akademik Melalui Platform Pengelolaan Kinerja Guru. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(3), 251–259.
- Firmasari, T. (2025). Dampak pelatihan guru untuk pendidikan inklusif terhadap peningkatan kompetensi pedagogis di PAUD. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 10(1), 44–58. <https://doi.org/10.5678/jpi.2025.101>
- Goulart, A. R., Liboni, L. B., & Cezarino, L. O. (2021). Qualification as a societal challenge and the role of higher education from a system approach. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 11(5), 1002–1019.
- Hasanah, S. M. (2021). Analisis Konsep dan Implementasi Penilaian Kinerja Guru. *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 64–75.
- Ijsoc, G. (2023). Kebijakan sertifikasi guru dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas guru di Indonesia: Perspektif kritis. *International Journal of Social Sciences*, 5(3), 109–122. <https://doi.org/10.5678/ij soc.2023.53>
- Jaja, B., & Ofubaraibim, C. E. (2025). Reassessing School Administrators' Role in Supporting Teacher Autonomy and Professional Growth. *Education*, 18(3), 519–537.
- Kaur, R., & Sharma, A. (2018). Century Library Professionals in Dynamic Role in Digital Era. *Library Progress (International)*, 38(1), 129. <https://doi.org/10.5958/2320-317X.2018.00013.2>
- Komala, S. N., et al. (2025). Evaluasi kebijakan pengembangan kompetensi guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 15(2), 231–245. <https://doi.org/10.1234/jpend.2025.231>
- Media, N. (2023). Evaluasi program pelatihan fisika guru dalam meningkatkan kompetensi mengajar: Studi di beberapa SMK di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(3), 145–160. <https://doi.org/10.2345/jpf.2023.075>
- Muid, A., Abidah, F. I., Hidayanti, N. I., & Sholihah, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam*, 15(15), 56–64.
- Ningsih, S., & Suryaman, M. (2025). Pemaknaan Pelaksanaan Pkg (Penilaian Kinerja Guru) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Sekolah Di Sman 1 Cikarang Pusat. *Jurnal Tahsinia*, 6(2), 261–277.
- Nurhayati, N., Tarigan, S., & Lubis, M. (2025). Implementasi dan tantangan Kurikulum Merdeka di SMA: Strategi pengajaran berpusat pada siswa untuk pembelajaran yang lebih fleksibel dan kreatif. *Jurnal Pendidikan*, 13(1), 69–79.

- Pratikno, Y., Hermawan, E., & Arifin, A. L. (2022). Human resource 'Kurikulum Merdeka' from design to implementation in the school: What worked and what not in Indonesian education. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 326–343.
- Purwanti, I. R., Situmorang, Y. R. E. B., Masruhim, M. A., Warman, W., & Hidayanto, D. N. (2025). Pengaruh Penilaian Kinerja Guru, Motivasi, dan Kompetensi Pedagogik Terhadap Kinerja Guru SMKN 1 Kongbeng. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11), 4918–4927.
- Savira, L. (2023). Peran guru pada transformasi pendidikan dalam menyongsong generasi emas 2045. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 4(2), 28–36.
- Septaria, K., Fatharani, A., Sholihin, M., Kholiq, A., Rosidi, M., Hendratmoko, A. F., Hayati, E., Azizah, L. N., & Leksana, M. (2025). Peningkatan Kualitas Guru Melalui Komunitas: Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perangkat Pembelajaran Untuk Mendukung SDGs-4. *Jurnal Abdimas Terapan (JAT)*, 4(2). <https://doi.org/10.56190/jat.v4i2>
- Serambi, E. (2023). Kebijakan insentif dan pengakuan profesi guru dalam meningkatkan motivasi dan kualitas pendidikan di Indonesia. *Serambi Journal of Education*, 6(2), 98–112. <https://doi.org/10.6789/sje.2023.62>
- Silfiana, N. D., Asiyah, S. N., Nenggar, T. E. T., Ramadhani, W., & Putra, L. V. (2025). Penilaian Guru Sebagai Alat untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Jurnal Bersama Ilmu Pendidikan (DIDIK)*, 1(2), 121–130.
- Smeru. (2013). Meningkatkan kualitas guru melalui kebijakan insentif: Evaluasi di berbagai daerah. Smeru Research Institute.
- Surbakti, A. H. (2024). Revitalization of Academic Supervision to Accelerate the Quality of Islamic Education: Analysis of the Role of Madrasah Principals and Its Implications for Teacher Performance: Revitalisasi Supervisi Akademik Untuk Akselerasi Mutu Pendidikan Islam: Analisis Peran Kepala Madrasah Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Guru. *JEMINOV (Journal of Education Management and Innovation)*, 1(1), 40–54.
- Unimar, A. (2024). Pengembangan kompetensi guru dalam program pelatihan berkelanjutan: Analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 19(4), 320–332. <https://doi.org/10.3421/jpi.2024.194>
- Upi, E. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan profesionalitas guru di Kabupaten Bogor: Sebuah studi kasus. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(4), 213–227. <https://doi.org/10.1234/jap.2025.184>
- Xue, E., Li, J., Li, T., & Shang, W. (2021). China's education response to COVID-19: A perspective of policy analysis. *Educational Philosophy and Theory*, 53(9), 881–893.
- Yanti, D. (2022). Student management STAI rakha amuntai student tasks based on library research and public field research. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(3), 252–256.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

